



ບົນິນີສຸກ ງຽວປີສຸກີ ຕາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ທິສະນີ ບນິນີສະນາ

DINAS PARIWISATA
 ຕາລິ ງຽວປີສຸກີ ກໍ່ສາກນິສິ ງຽວປີສຸກີ

BALI GOVERNMENT TOURISM OFFICE

ຕາລິ ງຽວປີສຸກີ ທິສະນີ ບນິນີສະນາ ບຸກຄະນິ ງຽວປີສຸກີ (໐໘໒໙) ທິສະນີ ງຽວປີສຸກີ
 JALAN S. PARMAN NITI MANDALA RENON, TELEPON (0361) 222387 DENPASAR - BALI 80235
<http://www.disparda.baliprov.go.id>, e-mail : infotourism@baliprov.go.id

Bali, 20 Juli 2023

Kepada
 Yth. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Provinsi
 Bali
 di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.20.044.2/3404/SEKRET/DISPAR

No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2024	1 dok	Disampaikan untuk memenuhi Surat Edaran Sekretaris Daerah Prov. Bali Nomor: 2929 tahun 2023 Tgl: 14 Juli 2023 Hal: Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2024. Demikian disampaikan utk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

 Tjok Bagus Pelayun
 NIP. 19660907 199903 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI**



**DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
TAHUN 2024**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dikembangkan dan diterbitkan secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan rancangan perencanaan pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali dalam satu tahun. Penyusunan Rancangan akhir Perubahan RENJA mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 dilakukan karena situasi terkini pariwisata Bali serta ketersediaan anggaran pada anggaran kas daerah. Diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 dapat menjadi acuan resmi dalam menjalankan Progran/Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 masih belum sempurna, karenanya masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.



Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan sinar suci-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata di Bali

Bali, Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

Tjok Bagus Pelayun
NIP. 19660907 199903 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE


 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PALAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	25
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat	26
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA	29
BAB V PENUTUP	30



A graphic consisting of a dark grey rectangular box with a white border, containing the text "DAFTAR TABEL" in white capital letters. The box has a slight 3D effect with a lighter grey shadow on the left side.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pariwisata Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022 12



A graphic consisting of a dark grey rectangular box with a white border, containing the text "DAFTAR LAMPIRAN" in white capital letters. The box has a slight 3D effect with a lighter grey shadow on the left side.

Lampiran 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Provinsi Bali.....	34
Lampiran 2.	Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022	39
Lampiran 3.	Rumusan Rencana Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	40



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pariwisata Bali berdasarkan kearifan lokal budaya Bali tidak bisa dilepaskan dari keinginan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor Pariwisata. Kearifan lokal budaya Bali sebagai daya dukung Pariwisata mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna mendukung Pariwisata. Sebagaimana diamanatkan aturan perundangan, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money follow function* diubah menjadi *Money follow program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial.

Perencanaan Pariwisata mengacu pada *Money follow program* maksudnya; walaupun program dan kegiatan dimaksud merupakan tugas pokok dan fungsi, namun kalau bukan merupakan program prioritas, maka tugas pokok dan fungsi tersebut belum tentu terdani. Pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial maksudnya dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) setiap perangkat daerah hendaknya menyeluruh, terpadu, dengan tema tertentu dan berdasarkan kewilayahan.

Arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengembangan desa wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan asing yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal).

Tema pariwisata dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat mendukung upaya Provinsi Bali dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pariwisata Provinsi Bali diharapkan memiliki peran dan kontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terkait dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan,



pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Isu utama pembangunan Bali saat ini adalah Pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah provinsi difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali karena pandemi covid-19. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi Bali.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditopang keberlanjutan Pariwisata. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya, seperti :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
 - 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
 - Program Pemasaran Pariwisata
 - 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
 - c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
 - 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan



- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- c. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- d. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali No 2929 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan Tidaklanjutnya

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; selanjutnya. Orientasi mengenai Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali; dilanjutkan pada proses di Sekretariat Daerah. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Bali dilakukan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 22 Februari 2023 di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali secara daring dengan mengundang Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Bali, Asosiasi Pariwisata, dan *stake holder* pariwisata Bali. Pada Forum Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Bali memaparkan Rencana Kerja Tahun 2024 sehingga para peserta forum dapat mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan dapat memberi masukan dan saran sehingga rencana tersebut lebih optimal.

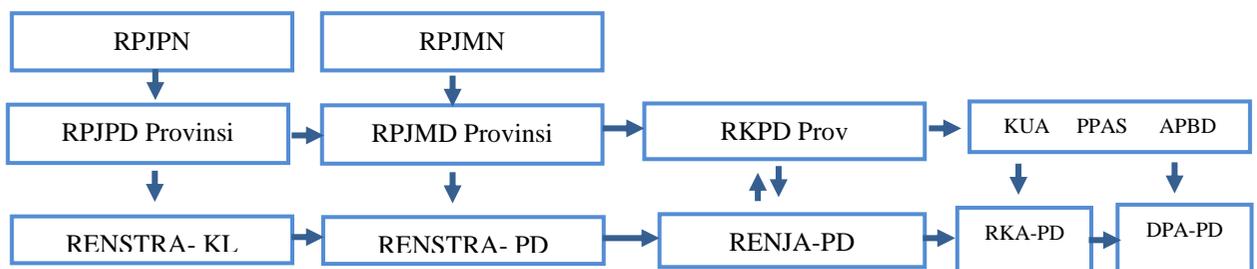
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Diagram 1.1 dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, selanjutnya akan menjadi acuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;



- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;



- 25) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
- 28) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- 29) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah wajib sinkron dengan Rencana Kerja Permerintah Daerah (RKPD), maka maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 adalah menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2024 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 dan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan, maka Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 akan disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2024.
- 2) Merancang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024.
- 3) Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026



- 4) Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024

Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Rencana Kerja (Renja), hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Pada Bab III Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali



diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan 3) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Bab IV. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI TAHUN LALU

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu berisi: 1) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata pada tahun 2023 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Pariwisata. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Urusan Pariwisata merupakan Urusan Pilihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah :

Tugas Dinas Pariwisata

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pariwisata;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Dinas Pariwisata

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan data tahun 2023, komposisi kepegawaian Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel.2.1
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	20
3	Strata 1	22
4	Diploma IV	-
5	Diploma III	4
6	Diploma II	-
7	SLTA / Sederajat	10
8	SLTP / Sederajat	1
9	SD	-
Total		57

Tabel.2.2
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	14
2	Golongan III	37
3	Golongan II	8
4	Golongan I	-
Total		59

Tabel.2.3
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Jafung	11
Total		18

Tabel.2.4
Aset Pada Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	5.270 M ²
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	12 Unit
3	Mobil Minibus	9
4	Truk	-
5	Sepeda Motor	3
6	Speed Boat	-
7	Perahu Ketek	-
8	Sepeda motor R3	-
9	Eskavator	-
10	Barang lainnya (Buah/Unit)	302 Unit



Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Pariwisata melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sebagai hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun ketiga akan diuraikan secara detail berikut ini:



Tabel 2.5
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.417.107.365,00	11.952.042.851,00	96,25	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82	82,65	99,04
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.597.394,00	115.808.035,00	99,33	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.313.098,00	39.774.278,00	98,66	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	6	6	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.284.296,00	76.033.757,00	99,67	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Dokumen	16	16	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	534	544	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	Dokumen	86	76	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.556.500,00	95.009.421,00	88,33	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jenis	6	6	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.178.000,00	3.085.295,00	73,84	Jumlah komponen listrik dan baterai yang	Jenis	6	6	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)					
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja			
							Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kantor				disediakan					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.321.200,00	13.433.444,00	82,30	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	Jenis	24	24	100	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	53.263.000,00	96,84	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	Jenis	4	4	100	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.838.300,00	4.944.082,00	63,07	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	8	8	100	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000,00	2.220.000,00	100	Jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis	1	1	100	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.999.000,00	18.063.600,00	82,11	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jenis	2	2	100	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.140.823,00	294.288.572,00	85,51	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	3	3	100	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	Jenis	1	1	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000,00	88.777.772,00	64,33	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	Jenis	3	3	100	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.140.823	203.510.800,00	99,69	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	Jenis	2	2	100	
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.218.428.708,00	1.196.276.783,00	98,18	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Jenis	3	3	100	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dipelihara				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.162.300,00	256.447.310,00	96,34	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	Jenis	4	4	100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	887.005.408,00	886.449.953,00	99,94	Terlaksananya urusan pemerintah	Jenis	6	7	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.261.000,00	53.379.520,00	81,79	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jenis	4	5	100
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	358.469.345,00	346.842.212,00	96,75	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Persen	3,85	3,85	100
A	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2.077.500,00	0,00	0	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	DTW	72	94	100
1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2.077.500,00	0,0	0	Pedoman pengelolaan desa wisata	Dokumen	1	1	100
B	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	216.204.749,00	210.513.262,00	97,36	Pedoman Jalur Wisata yang Berpihak pada Masyarakat Lokal	Dokumen	1	1	100
1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	216,204,749.00	210,513,262,00	97,36	Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskriptif Melalui Jalur Darat di Bali	Dokumen	1	1	100
C	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	140,187,096.00	136,328,950.00	97,24	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah	Usaha Pariwisata	3	3	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)					
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja			
							Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1 (satu) Daerah Provinsi				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan					
1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	115,548,996.00	113,880,596.00	98,55	Jumlah Buku Direktori Usaha Pariwisata yang tersusun	Buku	100	100	100	
					Jumlah Usaha Pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan dan pengawasan	Usaha Pariwisata	90	90	100	
2	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	24,638,100.00	22,448,354.00	91,11	Jumlah industry dan usaha pariwisata yang sesuai standar	Usaha Pariwisata	3	25	100	
III	Program Pemasaran Pariwisata	580.213.291,00	572.110.553,00	98,61	Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	37,50	78,75	100	
A	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	580.213.291,00	572.110.553,00	98,60	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Informasi Pariwisata	Orang	2.754.700	5.480.002	158	
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	227,487,896.00	227,091,969.00	99,82	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	Tayangan	9.000	50.751	227	
2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	80,046,751.00	73,576,088.00	91,91	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	Dokumen	1	1	100	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	272,678,644.00	271,442,496.00	99,54	Jumlah sarana promosi wisata digital	Video	4	4	100
IV	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	235,133,799.00	233,657,198.00	99,37	Persentase Pengajuan Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	3	2.2	100
A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	117,725,051.00	117,095,096.00	99,46	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Sarana dan Prasarana	9	9	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha	117,725,051.00	117,095,096.00	99,46	Jumlah usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan	Usaha	90	90	100
B	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	117,408,748.00	116,562,102.00	99,27	Jumlah Ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Ekosistem	9	9	100
1	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	117,408,748.00	116,562,102.00	99,27	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	Dokumen	1	1	100
b	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	39.343.548	39.109.038	99,40	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Ekosistem	9	0	0
1	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	39.343.548	39.109.038	99,40	Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya	Dokumen	1	0	0



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					bali yang disusun				
V	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	514,559,014.00	499,867,280.00	97,14	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi	Persen	44	44	100
a	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	514,559,014.00	499,867,280.00	91,14	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	Orang	203	203	100
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	514,559,014.00	499,867,280.00	91,14	-Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisas -Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	-Orang -Orang	-26 -177	-26 -177	100
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	370.183.400	342.955.860	92,64	Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan	Orang	120	120	100
4	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	159.702.406	157.153.246	98,40	-Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan -Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata	-Orang -Orang	-30 -45	-30 -45	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH PROGRAM :	5							
	JUMLAH KEGIATAN :	12							
	JUMLAH SUB KEGIATAN :	25							



Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata tahun 2022 adalah;

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari 5 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan, Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- B. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
 - b) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - c) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
 1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
- C. Program Pemasaran Pariwisata
 - a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - a) Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut



c. Realiasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari 5 program, 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

b) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

B. Program Pemasaran Pariwisata

a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

d. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu :

a) Yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan yaitu ada yang masih berproses pengajuan Hak Kekayaan Intelektualnya, sehingga menyebabkan tidak tercapai target kinerja yang direncanakan.

b) Yang menyebabkan capaian kinerja melebihi target yaitu karena keadaan dilapangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan khusus yang perlu diambil terkait tidak terealisasinya kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali maka akan ditindak lanjuti kembali pada RKPD pada tahun berikutnya.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tergolong baik, secara umum Realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.604.520.094,- atau 96,45% dari target Rp. 14.105.482.8145,-.

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) telah dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.6. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Stnadar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian				Catata n Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	-	3,50 Hari Wisman dan 2,30 Hari Wisnus	-	-	2,56%	3,85%	-	-	2,56%	3,85%	
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	-		-	-	13 DTW	72 DTW	-	-	13 DTW	94 DTW	
II	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	-	3,50 Hari Wisman dan 2,30 Hari Wisnus	-	-	-	1%	-	-	-	1%	
1	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	-		-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	
2	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan			-	-	-	3 Usaha Pariwisata	-	-	-	3 Usaha Pariwisata	
III	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	-	0 Orang Wisman dan 4.000.000 Orang Wisnus	-	-	-29,16%	37,50%	6,27 %	- 66,43%	-28,79%	78,75%	
1	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	-		-	-	2.209.400 Orang	2.754.700 Orang	-	5.263.617 Orang	3.500.000 Orang	5.480.002 Orang	
IV	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	145 USD dan Rp. 500.000	-	-	1 Usaha	3 Usaha	-	-	-	2,2%	



1	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	-		-	-	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	-	-	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	
2	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	-		-	-	9 Ekosistem	9 Ekosistem	-	-	-	9 Ekosistem	
V	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat	-	3,50 Hari Wisman dan 2,30 Hari Wisnus	-	-	43%	44%	-	-	75%	44%	
1	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	-		-	-	375 Orang	130 Orang	-	-	375 Orang	203 Orang	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu Yang Berkembang Pada Tahun 2022 Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali Adalah Sebagai Berikut :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bali
2. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Memiliki Kualifikasi Sesuai dengan Bidangnya
3. Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata
4. Belum Optimalnya Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
5. Adanya Ketimpangan Pembangunan Kepariwisata (Bali Utara dan Bali Selatan)
6. Pandemi Covid-19

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali baru diedarkan pada minggu kedua Bulan Juli 2022, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata baru dilakukan pada minggu ketiga Bulan Juli 2022. Untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dilakukan Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2022 dan kebutuhan tahun 2023. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah sesuai dengan



kebutuhan Provinsi Bali tahun 2023, tidak perlu mengusulkan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau program, kegiatan, dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Perangkat Daerah ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dan Bappeda Kabupaten/Kota maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menjadi daftar pendek

Tabel 2.7
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menyusun Tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024-2026. Selanjutnya pada Pada Bab III Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun adalah kebijakan Pariwisata pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah Kebijakan Pariwisata pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) secara ringkas adalah: Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Pariwisata serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Pariwisata Provinsi Bali adalah:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Pengembangan SDM Pariwisata
- c. Peningkatan Pemasaran Pariwisata
- d. Pengembangan Standar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024-2026 di tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata maka, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra).

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan lima sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya perekonomian Krama Bali



1.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pariwisata berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
II	Program Peningkata Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
III	Program Pemasaran Pariwisata
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
IV	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
V	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
	JUMLAH PROGRAM : 5
	JUMLAH KEGIATAN : 12
	JUMLAH SUB KEGIATAN : 25

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata, diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata terlampir dalam lampiran 2.



BAB V

PENUTUP

1) Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata yang berlaku 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Apabila di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tersebut terjadi keterbatasan dana atau efisiensi anggaran, maka target Rencana Kerja (Renja) disesuaikan. Tindak lanjut alokasi anggaran atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

2) Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, maka sudah disesuaikan dengan landasan dan dasar hukum yang berlaku. Substansi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata.

3) Rencana Tindak Lanjut

Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan kegiatan kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran

Kami berharap, bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk urusan



pariwisata dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024. Terima kasih



Lampiran 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3										
3	02									
3	26	01								
3	26	01	1.01							
3	26	01	1.01	01						
3	26	01	1.01	06						
3	26	01	1.02							
3	26	01	1.02	01						
3	26	01	1.06							



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Baterai yang disediakan	12 Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100	5 Jenis	12 Jenis	100
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat-alat Kantor yang disediakan	59 Jenis	-	31 Jenis	31 Jenis	100	28 Jenis	59 Jenis	100
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan	8 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	8 Jenis	100
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Jenis	-	10 Jenis	10 Jenis	100	6 Jenis	16 Jenis	100
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	2 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100	1 jenis	2 Jenis	100
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	4 Jenis	100
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	9 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	66,67
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Material dan Benda Pos untuk Kelancaran Administrasi	2 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	100
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Biaya Langganan Telepon, Air, dan Listrik	7 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	3 Jenis	7 Jenis	100
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Penataan Taman Kantor	7 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100	2 Jenis	7 Jenis	100
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	66,67
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Transportasi yang Dipelihara	8 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	8 Jenis	100
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah	6 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	100
3	26	01	1.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Peralatan Kantor	6 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	100



			09		si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara								
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	11,54%	-	2,56%	2,56%	100	3,85 %	6,41 %	55,54
						Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	2%	-	-	-	-	1%	1%	50
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	312 DTW	-	13 DTW	13 DTW	100	72 DTW	85 DTW	27,24
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Pedoman Pengelolaan Desa Wisata	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskriptif Melalui Jalur Darat di Bali	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	8 Usaha Pariwisata	-	-	-	-	3 Usaha Pariwisata	3 Usaha Pariwisata	37,5
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun	195 Buku	-	-	-	-	195 Buku	195 Buku	100
						Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90 Usaha Pariwisata	-	-	-	-	90 Usaha Pariwisata	90 Usaha Pariwisata	100
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar	18 Usaha	-	-	-	-	9 Usaha Pariwisata	9 Usaha Pariwisata	50



3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%	-	-29,16%	-28,79%	100	37,50%	37,50%	82,51
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	13.527.717 Orang	-	2.209.400 Orang	3.500.000 Orang	158	2.754.700 Orang	6.254.700 Orang	46,24
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi, Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	9.341 Tayangan	-	150 Tayangan	341 Tayangan	227	9.000 Tayangan	9.341 Tayangan	100
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	9 Video Promosi	-	1 Video	1 Video Promosi	100	4 Video Promosi	5 Video Promosi	55,55
3	26	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengajuan usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	9%	-	1%	0%	0	3%	3%	33,33
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	27 Sarana dan Prasarana	-	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	100	9 Sarana dan Prasarana	18 Sarana dan Prasarana	66,67
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan	108 Usaha Pariwisata	-	18 Usaha	18 Usaha	100	90 Usaha Pariwisata	108 Usaha Pariwisata	100
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	27 Ekosistem	-	9 Ekosistem	0 Ekosistem	0	9 Ekosistem	9 Ekosistem	33,33
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	3 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Ekosistem	0	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat	45%	-	43%	75%	100	44%	44%	97,77



					Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	415 Orang	-	375 Orang	375 Orang	100	130 Orang	505 Orang	121
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan	96 Orang	-	70 Orang	70 Orang	100	26 Orang	96 Orang	100
						Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	242 Orang	-	65 Orang	65 Orang	100	177 Orang	242 Orang	100



Lampiran 2.

Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022

No (1)	Rancangan RKPD Provinsi Bali					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikatif (6)	Program / Kegiatan	Lokasi (7)	Indikator Kinerja (8)	Target Capaian (9)	Kebutuhan Dana (10)	Catata Penting (11)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 3

Rumusan Rencana Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	2,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	3 Laporan	100 Persen	65,397,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							373,332,000			
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	2,332,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	36 Laporan	100 Persen	116,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	8 Laporan	100 Persen	255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah							1,096,780,012			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Denpasar, Denpasar					PENDAPATAN	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					339,199,888					
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya pedoman jalur wisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pesen	1 Dokumen	1 Dokumen	339,199,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE</p>														

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 02 1.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kuta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sempura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Persen	3 Unit Usaha	5 Usaha Pariwisata	15,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.45 Persen	1 Dokumen	20 Persen	145,662,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kuta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sempura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.45 Persen	1 Dokumen	20 Persen	93,735,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.45 Persen	1 Dokumen	20 Persen	196,652,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kuta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sempura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	18 Laporan	9 Sarana dan Prasarana	30,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kuta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sempura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	50 Laporan	9 Sarana dan Prasarana	65,028,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	35 Orang	44 Persen	172,529,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	44 Orang	44 Persen	135,481,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	50 Orang	44 Persen	175,343,744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE